

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian ini, terdapat hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan mengangkat judul,obyek, maupun subyek yang bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Abduh dan Rusliati (2018) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap manajemen laba yang diukur dengan *discretionary accrual* pada perusahaan pertambangan periode 2012-2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sebesar 53%. Komisaris independen dan komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Taco dan Ilat (2016) tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh *earning power*, komisaris independen, dewan direksi, komite audit dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015. Sebanyak 30 perusahaan digunakan sebagai sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuryana dan Surjandari (2019) penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap manajemen laba dan kinerja keuangan. Mekanisme *Good Corporate Governance* dalam peneliian ini diproksi melalui jumlah direksi, kepemilikan

institusional, kepemilikan manajerial, dan proporsi dewan direksi independen, serta komite audit. Penelitian ini menggunakan sampel 25 manufaktur perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016. Metode analisis penelitian ini menggunakan multi-regresi dan regresi tunggal. Penelitian ini menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, dan komite audit tidak memiliki makna atau tujuan apapun pada manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Mangkusuryo dan Jati (2017) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap manajemen laba yang diukur dengan *discretionary accrual*. Mekanisme GCG dalam penelitian ini diproksi dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada 11 perusahaan yang terdaftar di CGPI dengan tigattahun pengamatan yaitu 2013-2015. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 perusahaan yang terdaftar di CGPI mulai dari 2013 hingga 2015. Penelitian ini menghasilkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah *et al.*, (2016) Penelitian ini bertujuan untuk membahas pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap manajemen laba. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *food and beverages* tahun 2010-2013. Teknik pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh 14 perusahaan yang disertakan dengan kurun waktu 4 tahun sehingga didapat 56 sampel yang di observasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan *software* Eviews 8.0. Penelitian ini menyatakan bahwa variabel komisaris independen dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba. Sedangkan secara parsial komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan untuk komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Wirawati *et al.*, (2018) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan dividen, kompensasi, leverage terhadap praktik manajemen laba. Pemilihan sampel menggunakan

metode *nonprobability* dengan teknik *purposive sampling* dan yang didapatkan dari pemilihan sampel menggunakan metode tersebut 31 perusahaan terpilih menjadi sampel dari 144 perusahaan.. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini secara keseluruhan digunakan Software Program SPSS Version 17.0 For Windows. Penelitian ini menyatakan bahwa leverage secara empiris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution *et al.*, (2018) Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh *leverage*, kualitas audit, dan dewan komisaris independen terhadap manajemen laba pada perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2016. Sampel yang dipilih berdasarkan *purposive sampling* sebanyak 26 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan program *Eviews 9.0*. Penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial variabel leverage berpengaruh terhadap manajemen laba dan variabel komisaris independen tidak berpengaruh. Sedangkan secara simultan variabel leverage dan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Patrick *et al.*, (2015) bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap praktik manajemen laba yang diukur dengan model Jones *discretionary accrual*. Data primer dan sekunder digunakan pada sampel perusahaan Nigeria yang dikutip yang dipilih yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* dan sampel yang didapat adalah 23 perusahaan dengan tahun pengamatan antara periode 2011-2014. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan tabel, teknik regresi sederhana dilakukan dengan bantuan SPSS Ver. 22. Penelitian ini menghasilkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan Smaraidos *et al.*, (2018) bertujuan untuk menyelidiki pengaruh dari *Good Corporate Governance* pada keputusan yang dapat menimbulkan manajemen laba. Pada penelitian ini, sampel terdiri dari perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Athena dengan tahun periode pengamatan 2011-2015. Praktik manajemen laba yang diukur dengan

discretionary accrual. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan *software* Eviews 8.0. Penelitian ini menghasilkan bahwa dewan direksi dan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Asim dan Ismail (2019) dilakukan untuk meneliti dampak *leverage* pada manajemen laba. Populasi dari penelitian adalah 159 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Pakistan dari empat sektor utama yaitu tekstil, semen, kimia dan farmasi dengan tahun pengamatan 7 tahun yaitu tahun 2009-2015. Semua perusahaan keuangan dikeluarkan dari penelitian karena perbedaan struktur permodalan dan praktik akuntansi. Penelitian ini menggunakan Modified Jones Model 1995 yaitu *discretionary accrual* sebagai proksi manajemen laba. teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan bantuan *software* Stata. Penelitian ini menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan secara positif terhadap manajemen laba.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keagenan

Agency Theory (teori keagenan) diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 dan merupakan dasar untuk memahami tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*). Dalam teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Abdillah *et al.*, (2015:1), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (prinsipal) memperkerjakan orang lain (agen) untuk memberikan jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Hubungan antara prinsipal dan agen ini dapat mengarah kepada ketidakseimbangan informasi (asimetri informasi) karena agen lebih banyak mengetahui informasi perusahaan dibandingkan prinsipal. Adanya asimetri informasi dan kecenderungan dari pihak eksternal (investor) untuk lebih memperhatikan informasi laba sebagai parameter kinerja perusahaan, akan mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi dalam menunjukkan informasi laba, yang disebut sebagai manajemen laba (*earnings management*).

Menurut Mangkusuryo dan Jati (2017:1068) Hipotesis mengenai asimetri informasi berkaitan erat dengan *Agency Theory*. Asumsi yang menyatakan bahwa agent memiliki informasi yang lebih dibandingkan principal mengakibatkan agent memanfaatkan asimetri informasi untuk menyembunyikan informasi yang tidak menguntungkan dan hanya menyajikan informasi sesuai keinginannya terutama informasi yang menilai kinerja dari manajemen.

Menurut Hidayati (2015) hubungan keagenan terjadi ketika perbedaan kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*), serta hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut. Para manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham untuk membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (*Agency Theory*). Jadi, teori ini timbul pada saat keinginan dan tujuan dari *principal* dan *agent* berlawanan, dan melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh *agent* adalah hal yang sulit bagi *principal* (Abdillah *et al.*, 2015:2).

2.2.2. Good Corporate Governance

2.2.2.1. Definisi Good Corporate Governance

Istilah *Good Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh Komite Cadbury pada tahun 1992 dalam laporannya yang disebut sebagai Cadbury Report, menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham pada khususnya dan pemangku kepentingan.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia*, *Good Corporate Governance* merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Menurut Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. 23/MPM/BUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO), *Good Corporate Governance* adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* dapat dilakukan melalui mekanisme monitoring yaitu: memperbesar kepemilikan saham oleh pihak manajemen (kepemilikan manajemen), kepemilikan institusional, kepemilikan asing, serta mengangkat dewan komisaris. Pasal 1 Surat KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Menurut Tunggal (2013:24) pengertian *Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola serta mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham sekaligus sebagai perhatian *stakeholder*, karyawan dan masyarakat sekitar. Sedangkan menurut Effendi (2016:3) pengertian *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut: “*Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan”.

Sedangkan menurut Rustam (2017:294): “*Good Corporate Governance* merupakan serangkaian keterkaitan antara dewan komisaris, direksi, pihak-pihak yang berkepentingan, serta pemegang saham perusahaan. Corporate governance menciptakan sebuah struktur yang membantu perusahaan dalam menetapkan sasaran, menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, memerhatikan kebutuhan stakeholder, memastikan perusahaan beroperasi secara aman dan sehat, mematuhi hukum dan peraturan lain, serta melindungi kepentingan nasabah”.

2.2.2.2. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Agar penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* dapat berjalan dengan baik maka perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip *Corporate Governance* itu sendiri. Prinsip *Corporate Governance* biasa dikenal dengan istilah TARIF, dimana TARIF yang berarti *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*. Berikut adalah penjelasan dari tarif menurut Effendi (2016:20):

1. *Transparency* (Transparansi) adalah prinsip dasar untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, dimana perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dan material dengan cara yang dengan mudah dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Perusahaan juga harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
2. *Accountability* (Akuntabilitas) adalah prinsip dasar perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. *Responsibility* (Responsibilitas) adalah prinsip dasar perusahaan harus dapat mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate governance*.
4. *Independency* (Independensi) adalah prinsip dasar untuk melancarkan pelaksanaan *corporate governance* dengan baik, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan beserta jajarannya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. *Fairness* (Kesetaraan atau Kewajaran) adalah prinsip dasar perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. *fairness* mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan.

2.2.2.3. Tujuan *Good Corporate Governance*

Penerapan *Good Corporate Governance* secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan. Berikut adalah tujuan *Good Corporate Governance* menurut Suryana (2006) dalam Effendi (2016:7):

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik.
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Sedangkan menurut FCGI tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. *Corporate Governance* dimaksudkan untuk :

1. Mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi.
2. Mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi korporasi. Korporasi adalah mekanisme yang dibangun agar berbagai pihak dapat memberikan kontribusi berupa modal, keahlian (*expertise*), dan tenaga, demi manfaat bersama.
3. Memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera. Industri pasar modal telah berkembang. Secara teoritis, praktik *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai (*valuation*) perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya *Corporate Governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor.

2.2.3. Dewan Direksi

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengertian dari Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Sedangkan menurut Warsono *et al.*, (2010:55) menyatakan Dewan Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki fungsi utama memberi perhatian secara bertanggung jawab (*oversight function*) terhadap penerapan corporate governace dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Wallace dan Zinkin (2005) dalam Warsono *et al.*, (2010:55) menyatakan bahwa Dewan Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Antara lain menetapkan tujuan strategis perusahaan.
2. Melakukan review pelaksanaan rencana strategis
3. Memantau pengelolaan perusahaan
4. Memastikan sistem pengendalian internal berjalan semestinya.

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang.

2.2.4. Komisaris Independen

Menurut Makhalena (2010) dalam Firmansyah *et al.*, (2016:1553) Komisaris Independen merupakan lembaga pengawasan yang semata-mata bekerja untuk kepentingan perseroan secara umum, dia tidak lagi bertindak atas nama pemegang saham, tetapi harus mempertahankan kepentingan perseroan terhadap siapa saja, serta menjaga ditegakannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam perusahaan.

Menurut FCGI kriteria Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

1. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen.
2. Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau secara tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan.

3. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan dalam satu kelompok usaha dan tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi tersebut.
4. Komisaris independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
5. Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan dalam satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak secara langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
6. Komisaris tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan dalam satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
7. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan atau urusan bisnis apapun yang dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan perusahaan.

2.2.5. Komite Audit

Menurut Tunggal (2013:242) dalam Taco dan Ilat (2016:873-874) Komite Audit adalah subpanitia dari *board of director* yang terdiri atas direktur independen dari luar. Komite Audit mempunyai tanggung jawab pengawasan untuk pelaporan luar perusahaan; pemantauan resiko dan proses pengendalian; dan baik fungsi audit internal dan eksternal. Peraturan OJK 55/POJK.04/2015, menyatakan bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk dewan Komite Audit. Peran Komite Audit adalah memeriksa, menyarankan dan mengawasi informasi keuangan perusahaan yang akan di publikasikan terkait ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kep. 29/PM/2004 keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota, seorang diantaranya merupakan Komisaris Independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit. Dalam Kep-

643/BL/2012 untuk menjalankan fungsinya, tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

2.2.6. Leverage

Rasio *Leverage* mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang disimpan dari kreditur perusahaan tersebut. Rasio ini bertujuan untuk mengukur sampai seberapa jauh aset perusahaan dibiayai utang, rasio ini menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman (bank).

Rasio *Leverage* atau rasio solvabilitas atau rasio utang adalah perbandingan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pinjaman utang perusahaan yang dibiayai oleh aset dan ekuitas yang dimiliki perusahaan (Nasution *et al.*, 2018:3456). Adapun menurut Kasmir (2015:156): Rasio ini merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Rasio leverage memiliki manfaat sebagai bahan analisis. Berikut adalah tujuan dan manfaat Rasio *Leverage* menurut Kasmir (2012:153-154) :

1. Menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran pinjaman dan bunga.
2. Mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak kreditor.
3. Menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aset.
4. Menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang.
5. Menilai dan mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
6. Mengetahui keseimbangan antara nilai aset, khususnya aset tetap dan modal.
7. Mengetahui berapa jumlah pinjaman yang akan segera jatuh tempo.

2.2.7. Manajemen Laba (*Earnings Management*)

2.2.7.1. Definisi Manajemen Laba

Terdapat beberapa definisi manajemen laba menurut para ahli. Menurut Irham Fahmi (2014: 279) *Earnings Management* (manajemen laba) adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*). Tindakan *earnings management* sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Sedangkan menurut Schipper dalam Sulistyanto (2012:49) Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi (pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa hal ini hanyalah upaya untuk memfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses).

Menurut Davidson *et al.*, dalam Sulistyanto (2012:48), pengertian manajemen laba yaitu Manajemen laba merupakan proses untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan. sedangkan, menurut Sulistyanto sendiri (2008:48) dalam Firmansyah *et al.*, (2016:1554) Manajemen Laba merupakan upaya manajer untuk mengintervensi atau memperbaharui informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan dan mendapatkan keuntungan privat.

2.2.7.2. Motivasi Manajemen Laba

Terdapat beberapa hal yang dapat memotivasi individu ataupun badan usaha dalam melakukan manajemen laba. Berikut adalah beberapa motivasi manajemen laba menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam Sulistiawan *et al.*, (2011:31) :

1. Motivasi bonus.

Dalam sebuah perjanjian bisnis, pemegang saham akan memberikan sejumlah insentif dan bonus sebagai feedback atas kinerja manajer dalam menjalankan operasional perusahaan. Kinerja manajemen salah satunya diukur dari pencapaian laba usaha. Pengukuran kinerja berdasarkan laba dan skema bonus tersebut memotivasi para manajer untuk memberikan performa terbaiknya sehingga tidak menutup peluang mereka untuk melakukan tindakan manajemen laba.

2. Motivasi utang.

Selain melakukan kontrak bisnis dengan pemegang saham, untuk kepentingan ekspansi perusahaan, manajer seringkali melakukan beberapa kontrak bisnis dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah kreditor. Jika suatu perusahaan mendapatkan dana dari kreditor, perusahaan berkewajiban menjaga rasio keuangannya agar berada batas bawah tertentu. Jika hal ini dilanggar, perjanjian utang akan dibatalkan.

3. Motivasi pajak.

Tindakan manajemen laba tidak hanya terjadi pada perusahaan Go Public dan selalu untuk kepentingan harga saham, tetapi juga untuk

kepentingan perpajakan. Perusahaan yang belum Go Public cenderung melaporkan dan menginginkan untuk menyajikan laporan laba fiskal yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya. Hal inilah yang memotivasi manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba laba agar laba fiskal yang dilaporkan memang lebih rendah dari yang seharusnya tanpa melanggar aturan dan kebijakan akuntansi perpajakan.

4. Motivasi penjualan saham.

Motivasi ini banyak digunakan oleh perusahaan yang akan Go Public maupun yang sudah Go Public. Perusahaan yang akan Go Public akan melakukan penawaran saham perdananya ke publik atau lebih dikenal dengan istilah *Initial Public Offerings* (IPO) untuk memperoleh tambahan modal usaha dari calon investor. Begitupun dengan perusahaan Go Public untuk kelanjutan dan ekspansi usahanya.

5. Motivasi pergantian direksi.

Praktik manajemen laba biasanya terjadi pada sekitar periode pergantian direksi atau *Chief Executive Officer* (CEO). Menjelang berakhirnya masa jabatan, direksi cenderung bertindak kreatif dengan memaksimalkan laba agar performa kerjanya tetap terlihat baik pada tahun terakhir ia menjabat. Motivasi utama yang mendorong perilaku kreatif tersebut adalah untuk memperoleh bonus yang maksimal pada akhir masa jabatannya.

6. Motivasi politis.

Motivasi ini biasa terjadi pada perusahaan besar yang bidang usahanya banyak menyentuh masyarakat luas, seperti perusahaan-perusahaan industri strategis perminyakan, gas, listrik, dan air. Demi menjaga tetap mendapatkan subsidi, perusahaan-perusahaan tersebut cenderung menjaga posisi keuangannya dalam keadaan tertentu sehingga prestasi atau kinerjanya tidak terlalu baik. Hal ini dilakukan untuk mengurangi visibilitas perusahaan sehingga tidak menarik perhatian pemerintah, media, konsumen yang dapat menyebabkan meningkatnya biaya politis perusahaan.

2.2.7.3. Teknik Manajemen Laba

Teknik manajemen laba sangatlah beragam, mulai dari teknik manajemen laba yang diperbolehkan dalam SAK sampai yang tidak diperbolehkan dalam SAK. Berikut adalah beberapa teknik yang dapat dijumpai dalam manajemen laba menurut Wolk *et al.*, dalam Sulistiawan *et al.*, (2011:44) :

1. Mengubah Metode Akuntansi

Metode akuntansi merupakan pilihan-pilihan yang disediakan oleh standar akuntansi dalam menilai aset perusahaan. Bentuk-bentuk 17 pilihan metode akuntansi meliputi: metode penilaian persediaan (FIFO, LIFO, Rata-Rata Tertimbang, atau Identifikasi Khusus), metode penyusutan aset tetap (garis lurus, saldo menurun, jumlah angka tahun dan unit produksi), leasing, investasi pada obligasi, penggunaan metode harga pasar atau nilai buku pada asset jangka panjang, pembelian kembali saham perusahaan, dan pengakuan pendapatan.

2. Membuat Estimasi Akuntansi

Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi laba akuntansi melalui kebijakan dalam membuat estimasi akuntansi. Bentuk estimasi akuntansi tersebut meliputi: a) Estimasi dalam menentukan besarnya jumlah piutang tidak tertagih. b) Estimasi dalam menentukan umur ekonomis asset. c) Estimasi tingkat bunga pasar yang digunakan untuk mendiskonto arus kas pada masa mendatang untuk penilaian kewajaran aset yang tidak memiliki pembanding atau kewajaran nilai obligasi.

3. Mengubah Periode Pengakuan Pendapatan dan Biaya

Teknik ini dilakukan untuk mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan dan biaya dengan cara menggeser pendapatan dan biaya ke periode berikutnya agar memperoleh laba maksimum. Manajer akan mempercepat pengakuan pendapatan periode mendatang dengan melaporkannya ke periode tahun berjalan agar kinerja perusahaan pada tahun berjalan menjelang IPO terlihat baik atau menunjukkan laba maksimal.

4. Mereklasifikasi Akun *Current* dan *Noncurrent*

Dalam hal ini manajemen laba dilakukan dengan memindahkan posisi akun dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi, sebenarnya laporan keuangan

yang disajikan sudah sama, tetapi karena kelihaihan penyajinya, laporan keuangan ini bisa memberikan dampak interpretasi yang berbeda bagi penggunanya.

5. Mereklasifikasi *Accrual Discretionary* dan *Accrual Nondiscretionary*.

Accrual discretionary adalah akrual yang dapat berubah sesuai dengan kebijakan manajemen, seperti pertimbangan tentang penentuan umur ekonomis asset tetap atau pertimbangan pemilihan metode depresiasi. Sedangkan *accrual nondiscretionary* adalah akrual yang dapat berubah Karena kebijakan atau pertimbangan pihak manajemen, seperti perubahan piutang yang besar karena adanya tambahan penjualan yang signifikan. Akrual merupakan penjumlahan antara *accrual discretionary* dan *accrual nondiscretionary*. Makin tinggi nilai akrual menunjukkan adanya strategi menaikkan laba dan makin minus nilai akrual menunjukkan adanya strategi menurunkan laba.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Dewan Direksi Terhadap Manajemen Laba

Teori keagenan yang terjadi dalam perusahaan karena adanya benturan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen sehingga memungkinkan memaksa manajemen melakukan praktik manajemen laba agar kualitas dan kinerja manajemen terlihat baik sehingga kepentingan investor bisa tercapai. Menurut Warsono *et al.*, (2010:55) menyatakan Dewan Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki fungsi utama memberi perhatian secara bertanggung jawab (*Oversight Function*) terhadap penerapan *Corporate Governace* dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dalam hal ini Dewan Direksi diharapkan menjalankan peran nya dengan baik sehingga dapat mengurangi praktek manajemen laba.

2.3.2. Komisaris Independen Terhadap Manajemen laba

Perusahaan yang memiliki anggota Komisaris Independen dalam perusahaan menjadikan kontrol internal bagi manajemen perusahaan untuk selalu

berupaya meningkatkan kinerja perusahaan. Komite Audit membantu Dewan Komisaris, untuk menjaga kualitas laporan keuangan perusahaan (Abduh dan Rusliati, 2018:82). Komisaris Independen berfungsi sebagai penasihat yang memberikan saran, pendapat dan masukan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Tugas utama dari Komisaris Independen adalah menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan, dan rencana usaha seperti menilai sistem penetapan remunerasi para pejabat yang memegang posisi kunci yaitu memantau dan mengatasi konflik kepentingan dan memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan (Warsono *et al.*, 2010:107). Berdasarkan fungsi dan tugas utama dari Komisaris Independen diharapkan bahwa Komisaris Independen dapat mengurangi manajemen laba pada perusahaan.

2.3.3. Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Peraturan OJK 55/POJK.04/2015, menyatakan bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit. Peran Komite Audit adalah memeriksa, menyarankan dan mengawasi informasi keuangan perusahaan yang akan di publikasikan terkait ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan peran tersebut diharapkan dapat meminimalisir perilaku oportunistik manajemen.

Komite Audit yang berlatar belakang ahli di bidang keuangan merupakan pihak yang efektif untuk mengurangi manajemen laba. Hal ini karena komite audit ahli keuangan merupakan anggota komite audit yang benar-benar berpengalaman untuk menganalisis masalah-masalah pada laporan keuangan terutama mendeteksi kecurangan seperti manajemen laba. Selain itu menurut KNKG, untuk membangun Komite Audit yang efektif anggota Komite Audit ahli keuangan yang diperlukan adalah 1-3 orang dari jumlah total anggota Komite Audit secara keseluruhan (Firmansyah *et al.*, 2016:1554).

Selain itu, banyak penelitian yang mendukung keberadaan Komite Audit, diantaranya adalah hasil penelitian yang dilakukan Abdillah *et al.*, (2015) yang menunjukkan adanya hubungan negative antara Komite Audit dengan manajemen

laba. Hal tersebut menunjukkan bahwa Komite Audit telah berhasil dalam mengurangi praktik manajemen laba perusahaan.

2.3.4. *Leverage* Terhadap Manajemen Laba

Perusahaan dengan Rasio *Leverage* yang tinggi akibat besarnya jumlah utang dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki perusahaan, akan diduga melakukan *earnings management* karena perusahaan terancam *default* yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang sesuai pada waktunya. Tingkat *leverage* yang rendah atau tinggi dipengaruhi oleh pihak manajemen sendiri dalam mengelola tingkat hutang dari perusahaan tersebut dan pihak manajemen harus bisa mengelola tingkat hutang tersebut dengan cermat sesuai dengan perjanjian kontrak yang sudah diatur agar perusahaan tidak mengalami *default*. Perusahaan akan berusaha menghindari hal tersebut dengan membuat kebijaksanaan yang dapat meningkatkan pendapatan maupun laba, tindakan ini disebut dengan tindakan manajemen laba (Wirawati *et al.*, 2018:33).

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis bisa dikatakan merupakan jawaban sementara terhadap perumusan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan teori dan temuan empiris dari penelitian terdahulu, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H1 = Dewan Direksi berpengaruh negative terhadap manajemen laba.

H2 = Komisaris Independen berpengaruh negative terhadap manajemen laba.

H3 = Komite Audit berpengaruh negative terhadap manajemen laba.

H4 = *Leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan pengembangan hipotesis diatas makan skema kerangka konseptual dalam penelitian ini mengenai pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit dan *Leverage* terhadap manajemen laba adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.

Kerangka Konseptual

